PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Isvihana Siti Badriah Rahmat

Universitas Komputer Indonesia

Abstrack

From the results of the audit some areas in 2012 has not been an unqualified predicate (WTP) . This was due to the weakness of control caused by mistakes made repeated and the findings of the audit databases must address satisfying CPC still many irregularities that resulted in the lack of public accountability . The purpose of this study is to determine how much influence the internal control and audit performance against public accountability in the city of Bandung .

The population in this study were 43 employees inspectorate Bandung as Operation Supervisor Local Government Affairs (P2UPD) . Sampling method used when making that respondents to the questionnaire is low, then 30 % of the total respondents can be used as the basis of the total sample perhitungan.Analisis used is descriptive analysis and verification with quantitative approaches . The analysis model used is multiple regression analysis .

The results of hypothesis testing in this study show that (1) internal control weak influence on public accountability, (2) performance audit effect on public accountability, (3) internal control and audit performance affect public accountability .

Keywords : Internal Control , Audit Performance, Public Accountability .

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian, yaitu desentralisasi pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat; desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonomi yang telah dibentuk oleh

pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahandengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Ateng Syaifudin, 2006:17).

Local government (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public good and services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan *(equity),* partisipasi (*participation*), akuntabilitas *(accountability),* dan transparansi *(transparency)*(Basri, 2007:46).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Stanbury dalam Mardiasmo, 2003). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury dalam Mardiasmo, 2003).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan *(disclosure)* atas aktivitas dan kinerja fianancial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak baik publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya(Stanbury dalam Mardiasmo, 2003).

Pada perubahan orde baru ke era reformasi menurut pelaksanaan akuntablitas publik dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Asumsi UU No 17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efesiensi, dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Indra Bastian, 2006:74).

Persoalan korupsi telah diperbincangkan sejak satu dekade silam. Pasca reformasi 1998, korupsi telah menjadi *extraordinary crime,* kejahatan yang pemberantasannya memerlukan pendekatan yang menyeluruh(Abdullah Dahlan, 2012). Artinya, instrumen pemberantasan korupsi tidak hanya meliputi soal hukuman atau efek jera bagi pelaku korupsi, melainkan juga pencegahan terhadap potensi tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk korupsi di berbagai sektor, termasuk korupsi sektor publik. Abdullah Dahlan mengatakan korupsi disebabkan oleh minimnya akuntabilitas publik, ketika di saat bersamaan terjadinya monopoli sumber daya publik dan diskresi pada penggunaan kekuasaan.Yuna juga mengatakan bahwa minimnya akuntabilitas publik di Indonesia dapat dilihat dari sengkarut proses anggaran di berbagai kementrian. Dari semua kementrian hampir semua diisi oleh permainan dari calo anggaran berasal dari partai politik (Abdullah Dahlan, 2012).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan menyatakan dalam kerangka pengelolan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan maka perlunya kegiatan konsultatif, asistensi, fasilitatif, pelatihan, bimbingan teknis, serta transfer of knowledge di bidang akuntansi pemerintahan. Dengan terbangunnya

sinergi antara lembaga pengawasan pembangunan dan keuangan, Insya Allah akuntablitas pengelolaan Keuangan Daerah serta tata kelola pemerintahan di Jawa barat dapat semakin berkualitas, yang salah satunya tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK (Ahmad Heryawan, 2011). Lebih lanjut lagi Heryawan menyatakan pelanggaran pemerintah berdasarkan konsepsi otonomi daerah dewasa ini bergerak semakin cepat dan kompleks. Sehingga mengalami rekonstruksi mendasar dalam hal tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pertanggungjawaban keungan. Namun demikian, Heryawan menyadari bahwa untuk menghadirkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang berkualitas tersebut tidaklah mudah. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya permaslahan dan hambatan, yang tentunya harus diperbaiki bersama. Beberapa diantaranya sebagai berikut; dari sebanyak 27 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2009 se-wilayah Propinsi Jawa barat yang diaudit BPK, tidak ada satupun yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu akibat penyajian data pada beberapa pos di neraca yang tidak sesuai, sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK (Heryawan, 2011). Selain itu terdapat Sisa Lebih Pengguana Anggaran (SILPA) di akhir tahun 2009 pada setiap pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat menunjukan angka cukup besar, yaitu mencapai Rp. 5,946 triliun. Meski demikian, terdapatnya SILPA juga merupakan bentuk efisiensi belanja sebagaimana yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara masih tingginya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah. Hal ini terlihat dari 477 Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Jawa Barat sejak tahun 1998 hingga maret 201, dimana kerugian negara/daerah mencapai Rp. 849,5 miliar dan US $ 26,557 (Heryawan, 2011).

Dalam memenuhi akuntabilitas publik, pemerintah melaporkan kinerja secara detail. Berbagai fakta lapangan yang penting harus dipilah sebelum laporan disusun, karena banyak hal yang penting sering mengaburkan fokus pelaporan. Jadi, penilaian informasi yang relevan perlu dilakukan. Kriteria kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal-hal yang penting dapat dipilah menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) Mengetahui apa yang dianggap penting oleh *user*; 2) Memulai informasi tentang tjuan utama pelaporan kinerja dan komitmen-komitmennya pada pencapaian hasil; 3) Memuat informasi yang dinilai peling penting oleh organisasi sektor publik dari aspek kinerja (Bastian, 2006:303).

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah untuk mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin diperlukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektorpublik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor tersebut (Ismet Susila: 2008).

Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta

yang lebih luas di banding swasta. Ada tiga macam jenis audit yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja (Rahmansyah Ritonga, 2013).

Audit kinerja memfokuskan pemerikasaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi sustu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyedia jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efesiensi dan efektif. Konsep ekonomi, efesiensi, efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan/dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan, konsep efesiensi memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektivitas berarti bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat (Ismet Susila: 2008).

Banyak sekali fenomena yang terjadi di dalam pemerintahan kita, yaitu BPK RI menemukan modus perjalanan yang fiktif dan perjalanan dinas ganda pada audit laporan keuangan Negara semester 1 tahun 2012. Penyelewengan perjalanan dinas marak terjadi. Ketua BPK, Hadi Poernomo menjelaskan terjadinya penyelewengan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan kerudian Negara senilai Rp.77 miliar. Hadi juga menjelaskan pada semester 1 tahun 2012 BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan dengan temuan 80 kasus ketidak hematan, ketidakefesiensian, dan ketidakefektifan senilai Rp.125,43 miliar (Hadi Poernomo, 2012). Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 27 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 86.472,67, yang terdiri atas 5 kasus indikasi kerugian Negara/daerah/perusahaan senilai Rp 29.390,24, 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp 20.671,94 juta dan 16 kasus penyimpangan administrasi.Atas temuan-temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan penyetoran kas Negara/daerah snilai Rp 37.402,06 juta untuk indikasi kerugian Negara/daerah dn senilai Rp 13.585,13 juta untuk potensi kerugian Negara/daerah (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1, 2012).

Salah satu cara paling efektif untuk mencegah timbulnya fraud adalah meningkatkan sistem pengendalian intern (*internal control system*). Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa asas akuntabilitas sebagai salah satu dari asas-asas umum penyelnggaraan negara adalah asas menentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulaytan tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut telah diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang intinya mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakansanaan yang dipercayakan kepada aparatur pemerintah (Bappenas).

Penyelenggaraan kegiatan pada suastu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efesien dan efektif. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinana memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh (http://setjen.deptan.go.id).

Tak henti-hentinya sistem pengendalian intern (SPI) lembaga pemerintah mendapatkan serotan tajam dari berbagai pihak. Media ini pernah ada pula menurunkan tulisan menyoal SPI tersebut. Pada umumnya, sorotan terhadap SPI menyangkut kelemahan SPI itu sendiri. Ironis, sebab kelemahan, bahkan kekeliruan itu dilakukan berulang-ulang yang kemudian mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementrian/lembaga (K/L). Sorotan terhaap SPI merujuk pada hasil pemerikasaan BPK atas 34 laporam keuangan kementrian /lembaga tahun 2011 yang disampaikan BPK dalam Juni lalu. Dalam laporannya, BPK antara lain mengungkapkan temuan mengenai kelemahan SPI dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan. Permasalahan yang terkait dengan kelemahan SPI yang ditemukan BPK tersebut terutama terletak pada realitas ketidaktertiban dalam pengelolaan asset tetap, yang meliputi antara lain, asset tetap belum diinventarisasi dan dinilai, asset tetap tidak diketahui keberadaannya, asset tetap belum didukung dokumen kepemilikan, dan asset tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (http://www.businessnews.co.id).

Kota Bandung mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2012 yang diberikan BPK RI. Ada empat catatan yang diberikan, yaitu persoalan aset, kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan piutang dan pertanggungjawaban, pengendalian internal sewa tanah dan bangunan, serta hibah bansos. Tomtom Dabbul Qomar selaku Pelaksana Badan Anggaran DPRD Kota bandung menyatakan setiap tahun persoalan aset, mulai dari identifikasi aset, pendataan, investigasi, hingga sertifikasi aset. Persoalan mengenai aset ini memang masih terus carut marut, dan ini sangat dirasakan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tomtom juga mengatakan, gugatan dari masyarakat juga banyak dilayangkan kepada Pemkot bandung mengenai persoalan aset. Banyak persoalan mengenai aset hilang, atau aset yang disewakan tapi nilai PAD yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan objek yang disewakan. Permasalahan seperti itu harus dipecahkan secara serius, segera lakukan penelusuran dan investigasi agar bisa selesai (Tomtom Dabbul Qomar, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut penulis ingin dan menganalisis penelitian bertemakan “Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik”.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 pengertian

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisari, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: (a) Keandalan pelaporan keuangan, (b) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi, (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, (d) Efektivitas dan efesiensi operasi (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2009:221).

Secara etimologi, istilah audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu “audit” dan “kinerja”. Audit menurut Arens adalah kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Stephen P.Robbin dalam I Gusti Rai (2008:40) kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Dilain pihak Ahuya menjelaska:

“kinerja adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.”

Definisi yang cukup komprehensif tentang audit kinerja berdasarkan oleh Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge dalam I Gusti Rai (2008:41) adalah sebagai berikut:

> “Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif dan kinerja suatu organisasi, program, fungsi, dan kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan tehadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi audit kinerja adalah memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan.”

Miriam Budiardjo dalam Loina Lalolo Krina (2003) akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberikan mandat itu.

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak member amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” hipotesis adalah:

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru di dasarkan pada teori yang relevan bukan di dasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis berasumsi bahwa:

H1 : Terdapat pengaruh antara pengendalian intern dengan akuntabilitas publik

H2 : Terdapat pengaruh antara audit kinerja dengan akuntabilitas publik.

H3 : Terdapat pengaruh antara pengendalian inetrn dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pengendalian intern, audit kinerja dan akuntabilitas publik. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2010:2). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Sumber data adalah sumber-sumber data penelitian yang diperlukan dan dapat diperoleh secara langsung berhubungan dengan objek penelitian (primer). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah Studi Lapangan (*field research*) dan Studi Kepustakaan (*Library research*). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh pengendalian intern dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, maka uji statistiknya menggunakan uji analisis Regresi Linier Berganda/*Multiple Linear Regression*. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik.

Pengujian Simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama berperan atas variabel terikat. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan nilai F-kritis dengan nilai F-test yang terdapat pada Tabel Analisis of Variance (ANOVA). Jika nilai Fhitung > Fkritis, maka H0 yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat ditolak dan sebaliknya.

H0 ; ρ = 0, *Secara simultan* pengendalian intern dan audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

H1 ; ρ ≠ 0, *Secara simultan* pengendalian intern dan audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Dengan kriteria pengujian H0 ditolak apabila Fhitung > Fkritis (α = 0,05)

Peneliti melakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (uji parsial), hipotesisnya sebagai berikut :

H01 ; ρ = 0, pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

H11 ; ρ ≠ 0, pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

H02 ; ρ = 0, audit kinerja tidak berpengaruh *terhadap* akuntabilitas publik.

H12 ; ρ ≠ 0, audit kinerja berpengaruh akuntabilitas publik.

Kriteria pengakuannya yaitu sebagai berikut:

H0 ditolak apabila thitung < ttabel (α = 0,05).

IV. PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik

Pengendalian intern yang diimplementasikan di Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan dalam kategori cukup dalam interval 52 – 68, dan memiliki pengaruh yang terhadap Pengendalian Internal dibuktikan dari uji t_{hitung}lebih besar dari t_{tabel} yang bernilai 3,679, berarti menerima rumusan hipotesis Ha_2 yang berbunyi, “Pengendalian internberpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Publik survey pada Pemerintah Kota Bandung. Namun untuk mencapai pengendalian internal yang baik Pemerintah Kota Bandung, nyatanya dibutuhkan kriteria Pengendalian Intren dengan nilai dalam kategori yang sangat baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh lemah namun signifikan terhadap akuntabilitas publik. Pengendalian intern memberikan pengaruh lemah hanya sebesar 26,8% namun signifikan terhadap akuntabilitas publik. Artinya pengendalian intern pemerintah masih lemah atau belum optimal, terlihat dari indikator lingkungan pengendalian, penaksiran resiko dan pemantauan yang berkategori cukup.Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu “sistem pengendalin intern pemerintah masih lemah, hal ini terlihat dari hasil audit BPK yang sebagian besar belum dapat memeberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Penelitian yang hampir sama telah dilakukan oleh Anastasia Rasia Rahma Kresiadanti (2012) menjelaskan dalam penelitiannya berkaitan *internal control* dan *internal auditor* terhadap akuntabilitas bahwa terdapat hubungan *internal control* (pengendalian intern) terhadap akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian inetrn yang meliputi lingkungan pengendalian, penaksiran resiko oleh manajemen, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan akan berpengaruh baik dalam meningkatkan atau menurunkan akuntabilitas publik sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian beserta teori dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya untuk mempertahankan pengendalian yang baik maka seharusnya inspektorat lebih berhati-hati dalam memilih orang untuk ikut serta ke dalam pemeriksaan audit sebaiknya dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dan dipandang mempunyai pengetahuan yang memadai selain itu juga diberikannya pelatihan khusus audit.

4.2 Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Pengendalian intern yang diimplementasikan di Kota Bandung secara keseluruhan dalam kategori cukup dalam interval 68-84, dan memiliki pengaruh yang terhadap Pengendalian Internal dibuktikan dari uji t_{hitung}lebih besar dari t_{tabel} yang bernilai 4,938, berarti menerima rumusan hipotesis Ha_2 yaitu “Audit kinerjaberpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik di Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa audit kinerja berpengaruh jadi dapat dikatakan bahwa ada hubungan terhadap akuntabilitas publik yang dihasilkan. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas akan baik jika kinerjanya baik. Audit kinerja memberikan pengaruh sebesar 39,7% terhadap akuntabilitas publik. Dan hasil tanggapan responden mengenai audit kinerja secara keseluruhan dinyatakan baik, akan tetapi masih ada indikator yang berkriteria cukup yaitu efisien dan efektivitas serta kepatuhan kepada kebijakan /peraturan, sama halnya dengan fenomena “pemeriksaan kinerja mengungkapkan temuan ketidakefisienan dan ketidakefektivitasan serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Penelitian yang serupa juga telah dilakukan Sherly (2010) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jika audit kineja baik maka akuntablitas akan baik juga.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin baiknya audit kinerja yang dilakukan oleh Kota Bandung akan mempengaruhi akuntabilitas tersebut, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan I Gusti Rai (2008:31) audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektivitas dengan tujuan memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Berdasarkan fenomena, teori yang mendukung, beserta penelitian terdahulu maka dapat disarankan untuk melakukan rotasi semu untuk menjaga akuntabilitas publik.

Dalam hal ini audit kinerja lebih besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik dari pada pengendalian intern, karena pengendalian masih lemah maka pengendalian intern pemerintah Kota Bandung harus lebih diperhatikan

4.3 Pengaruh Pengendalian Intern dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalia intern dan audit kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengendalin intern dan audit kinerja memiliki hubungan yang lumayan kuat dengan akuntabilitas publik.

Inspektorat yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang menjadi indikator dalam pengenalian intern memepengaruhi akuntabilitas publik, begitu juga dengan audit kinerja, semakin bagus audit kinerja makan semakin bagus pula akuntabiltas publik yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yaitu audit kinerja dengan persentasi skor sebesar 39,7%sedangkan pengendalian intern sebesar 26,8% namun keduanya memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik dapat dijelaskan oleh variabel pengendalian intern (X_1) dan audit kinerja (X_2) sebesar 54,1% termasuk dalam kategori "tinggi" sedangkan sisanya 45,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Dengan kata lain, besarnya nilai variabel akuntabilitas publik ditentukan oleh variabel pengendalian intern (X_1) dan audit kinerja (X_2) sebesar 54,1% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain dari pengendalian intern dan audit kinerja seperti pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, dan manajerial (Dedy dan Sherly, 2010).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengendalian intern dan audit kinerja terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Bandung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengendalian intern pada pemerintah Kota Bandung secara umum berada dalam kategori cukup. Kegiatan pengendalian serta informasi dan komunikasi pada pemerintah Kota Bandung sudah baik. Namun lingkungan pengendalian, penaksiran risiko dan pemantuan pada pemerintah Kota Bandung masih termasuk dalam kategori cukup. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Bandung. Pengendalian intern secara parsial memberikan pengaruh lemah sebesar 26,8% terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Bandung.
2. Audit kinerja pada pemerintah Kota Bandung secara umum termasuk baik. Pengendalian secara independen, ekonomis, kesesuian antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi efektivitas dan efisien dan kepatuhan kepada kebijakan/peraturan masih termasuk dalam kategori cukup. Hasil pengujian menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Bandung. Audit kinerja memberikan pengaruh sebesar 39,7% terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Bandung.
3. Pengendalian intern dan audit kinerja secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 54,1% terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Bandung. Diantara kedua variabel independen, audit kinerja memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap akuntabilitas publik dibanding pengendalian intern.

5.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan selama melakukan Penelitian pada Pemerintah Kota Bandung, penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi instansi terkait, sebagai berikut :

5.2.1 Saran Operasional

1. Agar pengenalian intern baik maka pelaksanaan pemantauan lebih sering dan Inspektorat perlu memberikan perhatian yang lebih dalam membuat laporan audit, karena laporan audit tersebut harus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu lembaga legislatif, pemerintah, publik, maupun akedemisi.
2. Agar audit kinerja di Pemerintah Kota Bandung baik, maka pemerintah harus meningkatkan kinerja, dan berkaitan dengan ketidakefektivan dan ketidakeefisienan pemerintah harus meninjau ulang laporan tersebut karena masih lemahnya hal tersebut. Selain itu Pemerintah harus membuat aturan yang lebih ketat dari sebelumnya yang bisa membuat para pelanggar aturan jera akan hal yang dilanggarnya.
3. Agar saluran akuntabilitas dapat tersistem dengan baik, seperti auditor dan parlemen selain itu kepada pemegang otoritas yang lebih tinggi. Melalui variasi saluran akuntabilitas tersebut setiap masyarakat dapat menaggapi, mengkritisi, dan menyampaikan aspirasinya untuk dapat diteruskan kepada pejabat publik yang bersangkutan. Masukan dan keluhan dari masyarakat dapat menjadi rekomendasi untuk pejabat baru dalam memperbaiki kinerja peride berikutnya .

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

   Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sample yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.
2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa akuntabilitas publik dipengaruhi oleh pengendalian intern dan audit kinerja.

VI DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Theresia Damayanti, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Anastasia Rasia Rahma. 2012. *Pengaruh Internal Control dan Internal Auditor terhadap Akuntabilitas di Universitas Brawijaya*.

Andi Supangat. 2007. *Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Deddy Supardi dan Sherly Wiarty. 2010. *Peran Audit Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Bandung.* Jurnal Riset Akuntansi-Vol 1/No.2/ April 2010.

Gusnardi. 2008. *Analisis Faktor Audit Internal dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Good Governance.* Jurnal Ekuitas, 12(3): 353-372.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisni*s. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

I Gusti Agung Rai. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

I Made Wirartha. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2012.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.

Ismet Susila. 2008. *Audit Sektor Publik*. INOVASI, Volume 5, Nomor 2, Juni 2008 ISSN 1693-9034.

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: UGM.

Mashuri, Ilham. 2008. *Penentuan Tajuk dan Klasifikasi*. http://perpusstainkdr.multiply.com/journal/item/4/Penentuan_Tajuk_dan_Klasifikasi. 09/04/2011.

Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Penyempurnaan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Rahmansyah Ritonga. 2013. *Optimalisasi Audit Kinerja Instansi Pemerintah*.

Robert Tampubolon. 2006. *Risk and Systems-Based: Internal Auditing*. Jakarta: Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2009 . *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik* : Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. ALFABETA

Sukrisno Agoes. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor AkuntanPublik. Edisi Ketiga*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung : Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta : Genesis

Software:

SPSS 20M

Web:

http://bemkm.ugm.ac.id

http://economy.okezone.com

http://finance.detik.com

http://setjen.deptan.go.id

http://sumut.kemenag.go.id

http://www.pikiran-rakyat.com

VII LAMPIRAN

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pengendalian Intern	Pengendalian adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efesiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Sukrisno Agus, 2004:79)	1. Lingkungan Pengendalia 2. Penaksiran Risiko oleh Manajemen 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (I Gust Rai, 2008:86)	Skala Ordinal
Audit Kinerja	Audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh	1. Melakukan pengendalian secara independen	Skala Ordinal

	dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan peniaian secara independen atas ekonomi dan efesiensi, dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah dicapai sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. (Damayanti dan Abdul Halim, 2007)	2. Ekonomis, 3. Efesiensi dan Efektivitas 4. Kepatuhan kepada kebijakan peraturan yang berlaku 5. Menentukan kesesuian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 6. Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan (Theresia Damayanti dan Abdul Halim, 2007)	
Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggunjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	*1. Accontability for probity and legality* *2. Process accountability* *3. Program accountability* 4. *Policy accountability* (Muindiro, 2008:22)	Skala Ordinal

Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,084	,438		-,192	,848
	Pengendalian	,412	,112	,414	3,679	,001
	Audit	,605	,123	,555	4,938	,000

Korelasi Antara Pengendalian Intern dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

		Akuntabilitas	Pengendalian	Audit
Pearson Correlation	Akuntabilitas	1,000	,488	,611
	Pengendalian	,488	1,000	,135
	Audit	,611	,135	1,000
Sig. (1-tailed)	Akuntabilitas	.	,001	,000
	Pengendalian	,001	.	,203
	Audit	,000	,203	.
N	Akuntabilitas	40	40	40
	Pengendalian	40	40	40
	Audit	40	40	40

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,084	,438		-,192	,848
	Pengendalian	,412	,112	,414	3,679	,001
	Audit	,605	,123	,555	4,938	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736[a]	,541	,516	,52576

a. Predictors: (Constant), Audit, Pengendalian

b. Dependent Variable: Akuntabilitas